

## EVALUASI PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

Rini Indriyanti<sup>1</sup>, Edy Akhyary<sup>2</sup>, Edison<sup>3</sup>

[riniindriyant98@gmail.com](mailto:riniindriyant98@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*Gender responsive budgets are budgets that respond to the needs of men and women whose aim is to achieve gender equality and justice. In order for gender responsive development to be felt equitably and fairly, the Lingga Regency government issued the Lingga Regency Regional Regulation No. 7/2009 concerning Gender Mainstreaming. In implementing this gender responsive budget there are still many obstacles and shortcomings, therefore it is necessary to have support from related parties. This study aims to evaluate gender responsive budgeting in the Lingga Regency Education Office. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique in this study used triangulation techniques. In evaluating gender responsive budgeting at the Lingga Regency Education Office, the researcher used six indicators from William N. Dunn's theory. The results of this study can be seen from the effectiveness dimension, with gender responsive budgeting which is very helpful in enjoying equality and justice in enjoying the results of development. Judging from the dimension of efficiency, it has not reached the target in its implementation because there are activities that are not carried out optimally. Judging from the adequacy dimension of the flow of the budget is not sufficient to carry out activities. From the dimension of equity, the distribution is evenly distributed and has shown justice for men and women. Judging from the dimension of responsiveness, it is optimal, because of gender responsive activities. Judging from the dimension of stipulation, it has been effective because of the equality and fairness of positions between men and women. The conclusion is that gender responsive budgeting in the Lingga Regency Education Office has not been going well, because in the implementation of gender responsive budgeting there are still many shortcomings.*

**Keywords:** Evaluation, Gender, Responsive, Budgeting,

## I. Pendahuluan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kepada pembangunan gender dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah swasta dan masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara di pandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Kesetaraan dan keadilan gender sering menjadi masalah perempuan sehingga juga menjadi masalah pembangunan. Padahal laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-haknya dalam menikmati pembangunan.

Perlu diketahui bahwa gender berbeda sama sekali dengan jenis kelamin yang sering dibedakan atas perempuan dan laki-laki. Menurut Badan Pusat Statistika gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan. Gender dapat berubah seiringnya Perlu diketahui bahwa gender berbeda sama sekali dengan jenis kelamin yang sering dibedakan atas perempuan dan laki-laki. Menurut Badan Pusat Statistika gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan. Gender dapat berubah seiringnya berkembangnya sosial dan budaya dalam suatu masyarakat sedangkan jenis kelamin sifatnya kodrati atau menetap. Perbedaan gender tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila tidak menimbulkan kesenjangan pada perempuan dan laki-laki.

Isu gender merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap hasil pembangunan. Hasil-hasil pembangunan yang ada selama ini kurang dirasa manfaatnya karena belum bisa meningkatkan keterwakilan dan kebutuhan masyarakat terutama untuk perempuan. Pada saat ini memang masyarakat masih cukup kental dengan kultural patriarki yang menyebabkan ketidakadilan gender dan yang sering menjadi korban kaum perempuan. Untuk mengatasi kesenjangan gender pemerintah mengeluarkan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 terdapat pergeseran konsep mengenai pembiayaan pengarusutamaan gender di daerah. Dimana di dalamnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 Tahun 2003 menetapkan bahwa seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan pada dana APBN dan APBD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota sekurang-kurangnya 5% dari APBD provinsi, kabupaten dan kota yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 terdapat pergeseran konsep mengenai pembiayaan pengarusutamaan gender di daerah. Dimana di dalam adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 132 Tahun 2003 menetapkan pembiayaan pengarusutamaan gender minimal 5%, sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tidak terdapat batasan dan menghendaki keseluruhan dari APBD. Alokasi 5% dari APBD tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini tidak ada pemilahan anggaran belanja untuk pembangunan menurut jenis kelamin tetapi anggaran tersebut bisa memberikan manfaat dalam memperbaiki kualitas hidup keduanya. Beberapa bukti empiris bahwa hasil-hasil pembangunan di daerah Kabupaten Lingga

belum mampu memberikan manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada indikator *Gender-related Development Index (GDP)* untuk mengukur pemenuhan kebutuhan dasar.

**Tabel 1. 1 Indek Pembangunan Gender 2018 di Provinsi Kepulauan Riau**

Provinsi/Kabupaten /kota	Indek Pembangunan Gender						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Karimun	89,80	89,90	89,95	91,14	91,16	91,18	91,35
Bintan	90,75	91,03	91,18	91,50	92,15	92,41	92,58
Natuna	89,60	90,06	90,80	90,83	90,84	90,85	91,31
<b>Lingga</b>	<b>86,94</b>	<b>87,46</b>	<b>88,03</b>	<b>88,10</b>	<b>88,59</b>	<b>89,11</b>	<b>89,73</b>
Kepulauan Anambas	87,31	87,47	87,60	87,62	89,11	89,25	98,97
Kota Batam	93,27	93,60	93,64	93,95	94,45	94,62	94,21
Kota Tanjung Pinang	94,45	94,89	95,43	95,57	96,54	96,58	96,46

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018

Pemerintah Kabupaten Lingga telah menunjukkan keseriusan dalam pembangunan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) hal ini diwujudkan melalui Perda No 7 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam pembangunan daerah adapun tolak ukur keberhasilan strategis Pengarusutamaan Gender adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Di Kabupaten Lingga dalam bidang-bidang kebijakan pembangunan masyarakat, salah satunya pada bidang pendidikan.

Dalam mewujudkan Kabupaten Lingga berpendidikan, mengintegrasikan problematika gender dalam penganggaran perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Permasalahan gender yang diberikan masyarakat telah mencerminkan hubungan yang tidak simetris, sehingga berdampak pada ketidakadilan gender. Komitmen Kabupaten Lingga mengintegrasikan masalah gender dalam penganggaran di bidang pendidikan dirasakan masih belum tampak dan masih sedikitnya anggaran pendidikan yang responsif gender di Kabupaten Lingga.

**Tabel 1. 2 Anggaran Responsif gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Tahun 2018-2019**

No	Program	Kegiatan	Tahun	Nominal Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru	2018	153.535.000
		Pelaksanaan sertifikasi pendidik		160.420.000
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	2019	165.920.000
		Olimpiade guru nasional		90.860.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga

Tabel diatas menunjukkan jumlah program dan anggaran yang masih sangat sedikit. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada tahun 2018 mencapai Rp. 188.171.668.457,04 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 179.040.750.139,00 (95,15%) dan Anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Lingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 215.551.764.117,11 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 164.310.951.510,40 (83,07%). Jumlah anggaran yang responsif gender di Dinas Pendidikan hanya sebesar 0,017% dari anggaran APBD tahun 2018 dan 0,012% dari anggaran APBD tahun 2019. Dan dari sini dapat dilihat posisi perempuan dalam proses penganggaran yang

masih minim dan sebagian besar aktor dalam proses perencanaan, pembahasan maupun pelaksanaan didominasi oleh kaum laki-laki. Ini yang menyebabkan anggaran yang disusun masih ada yang bersifat bias gender.

Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi, kabupaten, kota). Sudah dimulai upaya untuk memfasilitasi dan mengadvokasi provinsi dalam rangka memperkuat komitmen para pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum dapat difasilitasi, maka perlu dilakukan model akselerasi PUG bidang pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan adalah dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumberdaya manusia yang siap bersaing di era globalisasi. Rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai oleh suatu masyarakat, seringkali dipakai sebagai indikator kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Taraf pendidikan masyarakat ini juga sangat menentukan kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional, bahkan Undang-Undang mengamanatkan alokasi sebesar 20 persen dalam anggaran belanja negara. Dinas pendidikan Kabupaten Lingga sebagai salah satu dinas yang memiliki kendala dalam proses penyusunan anggaran kerja belum memperlakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender secara maksimal.

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa “Evaluasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi masalah dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir”. Menurut Winarno (2007:144) “Evaluasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan”. Evaluasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa “Evaluasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, dan benefit”. Sementara itu, Grindel (dalam Winarno 2007:146) juga memberikan pandangan tentang Evaluasi dengan mengatakan bahwa “secara umum, tugas evaluasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Secara sederhana atau arti sempit, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kerja suatu kebijakan. Namun bercermin dari konsep evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2013:132), menurut Dunn, evaluasi (*evaluation*) adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dan serangkaian aksi dimasa lalu dan atau dimasa depan program. Evaluasi memberikan penilaian atas pencapaian tujuan untuk menjawab problema-problema yang akan terjadi setelah riset evaluasi dilaksanakan.

Anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender kedalam proses penganggaran, dan menterjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam komitmen anggaran. Menurut Mastuti bahwa anggaran responsif gender terdiri atas seperangkat alat instrument dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender (dalam Jurnal Perempuan Edisi 46: 2006). Menurut Budlender (2002:52) Anggaran reponsif gender berarti menentukan dampak dari kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah pada perempuan dan laki-laki. Inisiatif ARG dapat terdiri dari komponen yang berbeda dan sangat bervariasi di setiap negara dan wilayah yang diberikan khusus sosial mereka, konteks politik, dan sifat dari lembaga pelaksana mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga yang responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bungin (2009:68) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realita itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Macam-macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian tentang Evaluasi Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Penelitian ini berbeda dengan peneitian –penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Abdul Naris Agam (2016), Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar), Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender di Kota makasar. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB(ECOSOC) mendefinisikan PUG sebagai strategi agar kebutuhan dan pengalamn perempuan dan laki-laki menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desain implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijan dan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di kota makasar sudah dalam tahap implementasi ke semua SKPD.

2. Muhammad Alfatih Akbar.P (2016), Analisis Anggaran Responsif Gender pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016. penelitian ini berusaha untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian, menyelidiki secara rinci aktifitas atau pekerjaan manusia, dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengurus PPRG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan eksekusi PPRG yang dilaksanakan oleh SKPD atau Badan di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih belum optimal, karena dari hasil temuan penelitian dari 36 SKPD atau Badan yang mampu melaksanakan PPRG yang diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih belum optimal dalam rangka pelaksanaan PPRG.
3. Mirza Hafidzati Syarofah Adlina (2018), Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. hasil penelitian bahwa Anggaran Responsif gender di Provinsi Banten hanya mencapai 2,30% dari total Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah. Beberapa kendala yaitu pimpinan SKPD belum memahami persoalan gender, kegiatan responsif gender belum menjadi proiritas SKPD, dan belum terpenuhinya tugas-tugas tim *driver* PPRG. Rekomendasinya adalah dengan mengkomunikasikan pentingnya anggaran responsif gender kepada pimpinan pelaksana kegiatan, koordinasi melalui pertemuan setahun tiga kali agar lebih agar lebih intensif, menetapkan *reward and punishment* bagi tiap anggota tim percepatan penganggaran responsif gender, membahas tolak ukur bagi capaian anggaran rpsonsif gender ketika pembahasan anggaran daerah.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya kekhasan kajian ini dibandingkan dengan referensi terdahulu adalah objek penelitian yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dengan fokus pada evaluasi penganggaran responsif gender. Teori yang digunaka pada penelitian ini adalah teori oleh William N. Dunn, kriteria-kriterial evaluasi yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, dan Ketepatan.

### **Evaluasi Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga**

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang evaluasi penganggaran responsif gender di dinas pendidikan kabupaten lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah adanya penganggaran reponsif gender tersebut. Anggaran reponsif gender bukanlah anggaran yang terpisah antara kelompok gender dalam hal ini perempuan dan laki-laki. Anggaran responsif gender merupakan anggaran yang ditetapkan dengan menjadikan gender sebagai dasar kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasikan kebutuhan kelompok dari sisi gender dalam anggaran. Jadi anggaran responsif gender diharapkan menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan yang terkait akibat perbedaaan gender.

Evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari penganggaran responsif gender dan kendala apa saja yang ditemui dalam pencapaian misi, agar dapat dinilai dan menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan untuk masa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi tersebut, peneliti menggunakan teori kriteria- kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu : efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.

#### **1. analisi efektifitas**

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa: "Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter". Jika suatu kebijakan telah dilaksanakan namun ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil. Pengukuran kriteria efektifitas berhubungan dengan apakah alternatif kebijakan yang digunakan mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan. Efektivitas sebagai hubungan rasional teknis yang diukur dari hasil produk atau layanan tanpa mempergunakan biaya. Semakin baik produk yang dihasilkan dengan meminimalisirkan biaya maka tingkat efektifitas mencapai tujuan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penganggaran responsif gender di Dinas Pendidikan di katakana belum efektif karena masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan dari penganggaran responsif gender ini dari semua rencana yang telah ditetapkan belum tercapai secara keseluruhan di lapangan.

## **2. analisi efesiensi**

Efisiensi berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran tingkat efesiensi pelaksanaan penganggaran responsif gender tersebut dilihat bagaimana pihak-pihak terkait menjalankan program/kegiatan. Tingkat efesiensi untuk dinas pendidikan penerima anggaran diukur berdasarkan tingkat kepuasan serta dampak dirasakan setelah adanya penganggaran responsif gender tersebut. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efesiensi. Dalam penganggaran responsif gender ini tentu saja memiliki target dalam penyelesaiannya, jumlah yang diselesaikan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penganggaran responsif gender di dinas pendidikan belum efesien. Mulai dari banyaknya pihak terlibat dalam penganggaran, pelaksana dan pengawasan. Dimana didalam penganggaran banyak pihak yang dilibatkan dalam penganggaran ini. Serta dari segi sosialisasi pelaksana dan penganggarnya, tetapi tetap saja penganggaran ini masih belum efektif.

## **3. analisis kecukupan**

William N. Dunn (2003) berpendapat bahwa kecukupan (*adequacy*) berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada objek kebijakan tersebut. Kecukupan menguatkan pada hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Kriteria kecukupan tidak hanya pada pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang ditetapkan mampu melaksanakan penganggaran dengan baik. Pencapaian sasaran dengan besar biaya penganggaran responsif gender tentu saja sudah sangat cukup untuk pemenuhan terlaksananya program penganggaran responsif gender di Dinas Pendidikan. Karena adanya program pengarusutamaan gender sehingga di perkirakan sangat cukup untuk memenuhi terlaksananya program kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ketercapaian indikator kecukupan dalam memecahkan masalah, sangat di pengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Jadi terdapat kekurangan anggaran yang dianggarkan untuk sebuah program kegiatan atau program fisik. Sehingga dalam

penganggaran responsif gender ini tidak secara maksimal terlaksanakan dan belum terpenuhi secara optimal.

#### **4. analisis pemerataan**

Pemerataan adalah keadilan yang sama diberikan oleh sasaran kebijakan. Pemerataan ini juga bermaksud apakah biaya manfaat yang diberikan didistribusikan secara merata kepada sasaran kebijakan. Pemerataan dalam penganggaran responsif gender ini di buktikan dengan kegiatan yang responsif gender seperti sertifikasi guru dan pemangkatan guru terhadap laki-laki dan perempuan supaya adanya kesetaraan dan keadilan dalam suatu jabatan yang akan diduduki.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penganggaran responsif gender di Dinas Pendidikan dalam kegiatannya ini dapat dikatakan sudah merata. Akan tetapi karena adanya masalah kekurangan anggaran ini dan keterbatasan dalam kedudukan, akhirnya tidak semua mendapatkan. Untuk masalah ini sudah sangat mengurangi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Tinggal bagaimana mereka memikirkan bagaimana guru laki-laki dan perempuan menikmati hasil pembangunan.

#### **5. analisis responsifitas**

Responsifitas ini mengarahkan kepada kepuasan yang dirasakan oleh dinas pendidikan yang dianggap menggantungkan dengan adanya penganggaran responsif gender tersebut. Selama berjalannya program tersebut adanya yang menerima dan menolak. Berbagai respon positif dan negatif dinas pendidikan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan gagal. Sebuah responsivitas didapatkan berdasarkan bagaimana pihak pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa respon guru/ staf puas atau baik terhadap penganggaran responsif gender walaupun belum meratanya atau masih sedikitnya APBD, yang tidak mencukupi anggaran karena banyaknya program yang akan ditujukan.

#### **6. analisis ketetapan**

Ketepatan merujuk pada apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai untuk kelompok sasaran. Suatu kegiatan yang sedang dan sudah berjalan akan menghasilkan produk yang bermanfaat. Ketetapan dalam penganggaran responsif gender ini dinilai berhasil apabila tepat pada sasaran serta ketepatan dalam proses penganggaran. Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di dinas pendidikan sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah lain.

Penganggaran responsif gender ini diketahui mendapat respon baik atas terlaksananya program dan kegiatan ini. Penganggaran responsif gender yang dilakukan belum tepat sasaran dikarenakan masih rendahnya anggaran sehingga hasil dari program dan kegiatan responsif gender ini kurang terlaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara diatas, indikator evaluasi mengenai ketepatan sudah merujuk pada hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran yaitu guru-guru.

### **IV. Kesimpulan**



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, maka peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil yang didapat dari beberapa informan diketahui bahwa penganggaran yang dilakukan oleh dinas pendidikan belum dapat dikatakan efektif karena dalam penganggaran ini berjalan masih terdapat kekurangan.

1. Dari dimensi efektifitas, pencapaian tujuan dari penganggaran reponsif gender ini belum bisa dikatan berhasil. Berdasarkan wawancara terdapat pengawasannya yang belum maksimal dan optimal serta adanya dampak yang dirasakan seperti sedikitnya penganggaran anggaran untuk kegiatan. Sehingga tidak sepenuhnya tujuan untuk kesetaraan dan keadilan gender ini tercapai.
2. Dari dimensi efesiensi, berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penganggaran responsif gender ini terdapat ketidak efesiensi dalam pelaksanaannya.
3. Dari dimensi kecukupan, berdasarkan hasil wawancara bahwa seharusnya anggaran yang dialirkan tidak mencukupi, untuk melaksanakan kegiatan yang responsif gender. Sehingga kegiatan yang responsif gender ini tidak semuanya terlaksana dengan maksimal.
4. Dari dimensi perataan, pada dimensi ini sudah menunjukkan keadilan. Pemabagian dalam sertifikasi dan pemangkatan sudah di laksanakan dengan secara merata antara laki-laki dan perempuan.
5. Dari dimensi responsivitas, pada dimensi ini sudah optimal tanggapan dari guru laki-laki dan perempuan karena adanya kegiatan yang responsif gender ini.
6. Dari dimensi ketetapan, pada dimensi ini sudah efektif. Karena penganggaran reponsif gender ini sangat perlu biar adanya kesetaraan dan keadilan jabatan antara laki-laki dan perempuan

## V. Daftar Pustaka

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Burhan bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosisal lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Budlender, Debbie et.all. 2002. *Gender Budgets Make Cents (Understanding Gender Responsive Budgets)*. London: Commonwealth Secretariat.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung . Alfabeta.
- Sumbullah, Umi. 2008. *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averoes Press Bekerjasama Dengan Program Sekolah Demokrasi PlaCID's.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press ( Anggota IKAPI ).

### JURNAL

- Adlina, Mirza Hafidzati Syarofah .2018. *Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016*.
- Agam, Abdul Naris . 2016. *Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar)*,
- Akbar, Muhammad Alfatih. 2016. *Analisis Anggaran Responsif Gender pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016*.

Sri Mastuti, “*Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender*”, *Jurnal Perempuan* Edisi 46 (2006)

## **DOKUMEN**

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan membangun di lembar revisi skripsi saya.
2. Bapak Edison., MPA selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, serta staf Bidang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.